

# PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN

*Syamsudin, Bayu Tri Cahya, Syahrina Nurmala Dewi*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: syamsudin\_ums@yahoo.co.id

## ABSTRACT

*The Purpose of this research is to examine directly effect variables financial performance on economic growth, to examine directly effect economic growth on poverty and unemployment also to examine indirectly effect variables financial performance on poverty and unemployment. The samples of study are region expense and revenue budget in 2006 – 20011 at 7 municipal. The result of study with regression indicate that variables financial performance namely independently ratio, directly have positive significantly effect on economic growth, while effectiveness ratio and efficiency ratio directly have not significantly effect on economic growth. At economic growth directly have positive significantly effect on unemployment and also directly have positive significantly effect on poverty. To examine indirectly among variables financial performance on unemployment and poverty indicate independently ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio have significant effect on unemployment and poverty, while effectiveness have not significant effect on unemployment and poverty.*

**Keyword:** *financial performance, economic growth, poverty, unemployment*

## PENDAHULUAN

Sejak dimulainya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ( UU no 22 tahun 1999) dan pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah ( UU no 25 tahun 1999), atau lebih populer dengan Otonomi Daerah, telah banyak studi empiris yang telah dilakukan terkait dengan kinerja pemerintah daerah terutama kinerja anggaran/ keuangan.

Penelitian ini merupakan kajian kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Eks-Karesidenan Surakarta 2005-2011. Sularmi dan Agus Endro Suwarno (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau Aspek Keuangan (Studi Empiris pada Wilayah Karesidenan Surakarta)”, menyebutkan bahwa kemandirian

pemerintah daerah disetiap kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta masih relative rendah karena pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat, sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah di Karesidenan Surakarta dilihat dari segi keuangannya belum berhasil untuk mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal, dimana rasio PAD dan BHPBP baik secara rata-rata maupun untuk setiap tahunnya selama tiga tahun anggaran (2001-2003) memiliki proporsi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan rasio sumbangan/subsidi pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui bahwa struktur pemerintahan yang baik pada umumnya mampu melindungi dan melayani kebutuhan masyarakat. Pada pemerintahan yang baik, struktur pemerintah biasanya berdasarkan

sistem “*check and balances*”. Indikator kesuksesan pada organisasi pemerintahan tidak diukur dari saldo laba, tetapi dilihat dari mutu pelayanan dan efisiensi dari penggunaan dana yang tersedia. Maka, suatu daerah bisa kuat keuangannya karena tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Di mana Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui dan ditetapkan DPRD melalui peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah, dan dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Anggaran daerah juga sebagai alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Selain itu, anggaran tersebut dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral yang harus memuat kinerja keuangan, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan

berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

Kajian kinerja keuangan dalam penelitian ini berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi. Ketiga rasio tersebut dapat digunakan peneliti untuk menguji secara langsung pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, menguji secara langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran serta menguji secara tidak langsung pengaruh kinerja keuangan terhadap kemiskinan dan pengangguran.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Kemandirian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang ditujukan untuk proses restrukturisasi pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari program pemerintah yang dibuat dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan daerah dalam mengelola informasi kedaerahan, membuat pemerintah daerah berada dalam posisi lebih baik, untuk memobilisasi sumber daya secara mandiri serta untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah. Setelah suatu sistem pengelolaan keuangan terbentuk, perlu disiapkan suatu alat untuk mengukur kinerja dan untuk mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi : KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Menurut Halim (2001), gambaran kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya, dan untuk bersaing secara sehat dengan daerah lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata dalam mengukur tingkat kemandirian, yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi PAD dengan total pendapatan daerah.

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Tingkat kemandirian daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi tingkat kemandirian. Semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi pula. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

## 2. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian efektifitas terkait dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Nilai efektifitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Budiarto, 2007). Apabila persentase kinerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90% - 100 % adalah efektif, 80% - 90% adalah cukup efektif, 60% - 80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif.

## 3. Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien, apabila rasio yang dicapai kurang dari 1(satu) atau dibawa 100%. Semakin kecil rasio ini, berarti kinerja pemerintah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat, berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan, karena keberhasilan Pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatannya sesuai target kurang memiliki arti, jika biaya yang dikeluarkan untuk itu lebih besar dari realisasi pendapatannya. Dalam hal ini, asumsinya adalah pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan kebutuhannya, dan memenuhi apa yang direncanakan.

Kegiatan pada sektor pelayanan masyarakat, adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik, dengan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah, atau, dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan (dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut), maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

## 4. Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).

Menurut pendapat Sadono Sukirno (1994), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Ukuran yang sering digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan perkembangan lainnya. Todaro (1997) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. Pengertian pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja (Putong, 2003).

Penelitian Arthur Okun dalam Putong (2003) mengatakan apabila GNP tumbuh

sebesar 2,5% diatas trendnya yang telah dicapai pada tahun tertentu, maka tingkat pengangguran akan turun sebesar 1%. Jadi  $1\%/2,5\% = 0,4\%$ . Apabila tingkat pengangguran ingin diturunkan sebesar 2%, maka pertumbuhan ekonomi haruslah dipacu agar bisa tumbuh sebesar 5% diatas rata-rata..

Ada beberapa indikator yang menyebabkan orang terperangkap kemiskinan, diantaranya perkembangan di bidang sosial dan ekonomi antara lain pelayanan kesehatan, gizi, pengajaran, perumahan, konsumsi, transportasi dan jasa, pertanian, industri dan perdagangan.

Diluar hasil tersebut secara logis Keterkaitan Antara Kinerja Keuangan Dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan ketika Kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kurang atau tidak adanya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan daerah tersebut. Di samping itu, aparat daerah dapat secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan pada daerah tersebut. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang.

## 5. Penelitian Terdahulu

Riset yang pernah dilakukan oleh Hamzah (2007), yaitu studi pada 29 Kabupaten dan 9 kota di Propinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa, hasil pengujian secara langsung antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa, rasio kemandirian1, rasio kemandirian2,



dan rasio efisiensi, berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektifitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran menunjukkan terdapat pengaruh positif, sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan terdapat pengaruh secara negatif. Pada pengujian secara tidak langsung antara kinerja keuangan dengan pengangguran dan kemiskinan menunjukkan rasio kemandirian<sup>1</sup>, rasio kemandirian<sup>2</sup>, dan rasio efisiensi secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya Landiyanto (2005), melakukan penelitian pada Pemerintahan Kota Surabaya (Pemkot Surabaya) menyimpulkan bahwa pemerintah kota Surabaya memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat, yang disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan PAD kota Surabaya. Pemkot Surabaya perlu meningkatkan penerimaan dari sumber daya daerah ( pajak dan retribusi ) serta optimalisasi kinerja BUMD. Selain itu juga perlu diberi keleluasaan dalam melakukan pinjaman untuk pembiayaan pembangunan. Ketergantungan finansial pemerintah daerah juga dikemukakan oleh Setu Setyawan ketika mengukur kinerja Anggaran pemerintah kota Malang.

Haryanto (2007), dalam penelitian mengenai Dampak Desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia menyebutkan dalam kesimpulan penelitiannya bahwa, desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam, daripada daerah bukan pusat bisnis, dan miskin sumber daya alam. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Pendapatan Per Kapita.

Penelitian ini mendukung pernyataan BAPENAS (2003) yang menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi (Harianto dan Adi, 2007).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Priyo Hari Adi (2007) menyimpulkan bahwa belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi . Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar memberikan peluang bagi daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Mardiasmo, 2002).

Setiaji dan Hadi (2007) dengan judul “Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)”. Hasil penelitian ini terdapat perbedaan *Growth* (pertumbuhan) PAD yang signifikan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. Pertumbuhan PAD setelah otonomi secara empiris lebih tinggi (lebih baik) dibanding pertumbuhan PAD sebelum otonomi. Namun demikian, perbedaan ini tidak diikuti dengan kenaikan *share* (kontribusi) PAD terhadap belanja. Kontribusi PAD terhadap belanja justru lebih rendah dibanding kontribusi setelah otonomi.

Tawangningrum (2009) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2005-2007”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Boyolali belum dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian daerah yang masih rendah, karena ketergantungan pada sumber pendapatan dari pihak ekstern yang masih cukup tinggi. Hal ini dikarenakan sumber-sumber keuangan potensial negara adalah milik pemerintah pusat. Namun bila dilihat dari Rasio Efektifitas dan Efisiensi kinerja pemerintah daerah Boyolali sudah berjalan efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Ronald dan Sarmiyatiningsih (2010) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sesudah diberlakukannya Otonomi Daerah, rasio efisiensi belanja cenderung menurun, artinya Belanja Daerah cenderung efisien sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan meskipun dalam angka yang relatif kecil. Hal ini dimungkinkan karena dalam penelitian ini tidak mengidentifikasi penyebab terjadinya varians dalam analisis efisiensi belanja sehingga ada kemungkinan memang terjadi efisiensi yang tinggi. Akan tetapi dapat juga karena ada sebagian kegiatan yang tidak dilaksanakan atau dikarenakan penyusunan anggaran yang masih menggunakan sistem tradisional sehingga terdapat kemungkinan penentuan anggaran yang kurang tepat yang berakibat pada hasil pengukuran kinerja menggunakan ukuran efisiensi belanja menjadi tinggi.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier berganda untuk melakukan analisis terhadap variabel-variabel penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dirancang untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan (rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi) terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh tidak terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak lain (Sekaran, 2006). Alasan penggunaan data sekunder dengan pertimbangan bahwa data ini mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota tahun 2006-2011.

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang kemudian dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Data LKPD yang dikumpulkan diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI, melalui situs [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) dan situs-situs lain yang menyediakan informasi tersebut, serta kunjungan langsung pada DPPKA masing-masing kabupaten/kota Se-Soloraya

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *judgement-sampling*, dimana sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah peneliti ditetapkan. Kriteria tersebut antara lain, (a) Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan pendapat wajar dengan pengecualian atau wajar tanpa pengecualian (b) Tersedia data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Pengukuran Variabel Penelitian, yaitu dengan variabel kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi serta pertumbuhan ekonomi. (a) Rasio Kemandirian. Merupakan perbandingan antara ketergantungan pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Formula yang digunakan untuk mengukur adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

(b) Rasio Efektifitas. Menurut Widodo (Halim, 2004:285) Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. PAD efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100. Namun demikian, semakin besar rasio efektifitas menggambarkan kinerja pemerintah yang semakin baik. Formulasinya adalah sebagai berikut

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

(c) Rasio Efisiensi. Menurut Mahmudi (2007: 152) rasio efisiensi belanja merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran/belanja daerah dengan anggaran belanja daerah. Semakin kecil rasio belanja maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Anggaran pemerintah efisiensi jika rasionya kurang dari 100, dan sebaliknya. Formulasinya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (Realisasi Pengeluaran)}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

(d) Pertumbuhan Ekonomi, untuk pertumbuhan ekonomi diukur pendapatan domestik regional bruto (PDRB) saat ini dikurangi dengan PDRB sebelumnya dibagi dengan PDRB saat ini. Pertumbuhan ekonomi berguna untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara, seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{GDP_t - GDP_{t-1}}{GDP_{t-1}} \times 100\%$$

(e) Pengangguran. Tingkat pengangguran dapat dihitung, yaitu dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara

(f) Kemiskinan. Mendefinisikan kemiskinan berarti pula harus memahami konsep yang ada terhadap makna 'makmur'. dikaitkan dengan apa yang pada umumnya dimaknai sebagai miskin, baik individu maupun keluarga dimana mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsep ini adalah dengan melakukan perbandingan terhadap pendapatan, konsumsi, pendidikan atau atribut lainnya dari 'si miskin' dengan ambang batas yang telah didefinisikan dan dalam penelitian ini menitikberatkan pada dimensi moneter terhadap kondisi 'sejahtera', pendapatan dan konsumsi secara obyektif dan kuantitatif

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Statistik Deskriptif

Dalam analisis deskriptif yang tersaji dalam tabel 1 menunjukkan bahwa rasio kemandirian memiliki *mean* sebesar 8,3602 yang berarti pemerintah kota dan pemerintah daerah di karisidenan Solo rata-rata mempunyai kemampuan PAD sebesar 8,3% dari total penerimaan daerah. Sementara itu untuk rasio efektivitas memiliki *mean* sebesar 105,4648 yang berarti bahwa rata-

rata kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan adalah

sangat efektif. Hal ini dikatrenakan prosentase kinerja keuangan yang dicapai diatas 100%, yaitu sebesar 105,46%.

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RASIO.KEMANDIRIAN	42	.06	17.59	8.2205	3.07852
RASIO.EFEKTIVITAS	42	76.90	124.50	105.4648	10.17009
RASIO.EFISIENSI	42	7.50	14.64	11.1738	1.75349
PERTUMBUHAN.EKO	42	1.73	6.53	4.8907	1.12759
KEMISKINAN	42	6.21	19.08	14.1336	3.42080
PENGANGGURAN	42	3.19	15.52	6.6555	2.89796

Dalam analisis deksriptif dalam tabel 1 di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian memiliki *mean* sebesar 8,3602 yang berarti pemerintah kota dan pemerintah daerah di karisidenan Solo rata-rata mempunyai kemampuan PAD sebesar 8,3% dari total penerimaan daerah. Sementara itu unuk rasio efektivitas memiliki *mean* sebesar 105,4648 yang berarti bahwa rata-rata kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan adalah sangat efektif. Hal ini dikatrenakan prosentase kinerja keuangan yang dicapai diatas 100%, yaitu sebesar 105,46%.

Sedangkan untuk rasio efisiensi memiliki *mean* sebesar 11,1738 yang berarti bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan sebesar 11,17% dari total realisasi pendapatan. Selanjutnya untuk nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 4,89. Nilai minimum pertumbuhan ekonomi sebesar 1,73 dan nilai maksimumnya sebesar 6,53. Dari pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwasanya terdapat hasil yang cukup baik walaupun belum pada tingkat yang memuaskan. Begitu juga dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan dimana masih juga belum menunjukkan pada tingkat yang baik.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menunjukkan bahwa besarnya nilai Kolmogorov Smirnov adalah 0,309. Sehingga karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan terkait hasil analisis menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel independendibawah nilai 10 dan *tolerance value* diatas 0,10. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil diatas maka tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Untuk heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Glejser. Dimana dalam uji ini meregresi nilai absolut residual dengan variabel independen. Dari hasil olah data yang dilakukan tidak ada satupun variabel yang secara signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen absolut. Hal tersebut kadang dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Begitu juga dengan uji autokorelasi Dari hasil pengujian tampak bahwa nilai DW untuk persamaan model regersinya adalah sebesar 1,314. Nilai tersebut berdasarkan kriteria dari pernyataan Singgih Santoso angka D-W sebesar 1,314 terletak di antara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi.



### 3. Analisis Regresi

Dari hasil perhitungan data yang diperoleh secara studi empiris disajikan dalam tabel 2 berikut ini

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,157	2,804		,769	,446
	RASIO.KEMANDIRIAN	,181	,065	,453	2,802	,008
	RASIO.EFEKTIVITAS	,010	,018	,091	,568	,573
	RASIO.EFISIENSI	,015	,113	,023	,129	,898

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN.EKONOMI

Dari hasil olah data diketahui bahwa kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 21,8 % sedangkan sisanya dipengaruhi dari aspek lain. Dari hasil olah data tersebut diketahui bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi 1%

Hasil analisis regresi di atas menunjukkan bahwa dari ketiga hipotesis yang diajukan oleh peneliti hanya hipotesis pertama yang diterima, dimana rasio mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hipotesis pertama dan kedua ditolak, dimana rasio efektifitas dan rasio efisiensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kota/kabupaten di kawasan Solo Raya. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2008), studi pada 29 Kabupaten dan 9 kota di Propinsi Jawa Timur

Penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan. Hal ini dikarenakan semakin besar PAD yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah serta semakin kecil

pinjaman dan bantuan pusat, maka semakin mandiri daerah tersebut.

Dengan semakin mandiri daerah tersebut, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan daerah tersebut mampu mengelola dengan ekonomis, efisien, dan efektif serta kurangnya campur tangan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Selain itu Hasil analisis regresi juga menunjukkan bahwa rasio efektifitas dan efisiensi terbukti tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kota/kabupaten di kawasan Solo Raya. Hal ini berarti hipotesis kedua dan ketiga yang peneliti ajukan ditolak.

Pada rasio efektifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan perbedaan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD pada masing-masing daerah tidak terlalu signifikan atau kurang memenuhi ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Dengan kurang adanya perbedaan yang signifikan tersebut, maka kurang mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Untuk rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan realisasi belanja yang tidak cukup kecil daripada realisasi pendapatan yang diterima atau adanya *inefisiensi*. Dengan adanya inefisiensi, maka sebagai anggaran yang

dialokasin belum mampu yang mendorong pertumbuhan ekonom secara signifikan.

Sedangkan terkait dengan menunjukkan hasil sebagai berikut Untuk hasil pengujian

pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dapat ditunjukkan pada tabel IV.7 sebagai berikut.

**Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear**

Model B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	Std. Error	Beta			
(Constant)	1.970	1.891		1.042	.304
1 PERTUMBUHAN. EKONOMI	.958	.377	.373	2.541	.015

a. Dependent Variable: PENGANGGURAN

Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh signifikan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi hanya berdasarkan angka-angka makro saja, seperti tingkat inflasi yang terkendali, nilai tukar rupiah yang stabil, Indeks Harga Saham Gabungan (HSG) yang menguat dan lain-lain, sedangkan pada sektor riil khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kurang berkembang dan berdaya sehingga kurang atau tidak menyerap jumlah pengangguran. Selain itu, juga

dikarenakan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor riil juga relatif kecil sehingga pertumbuhan sektor riil juga stagnan bahkan menurun. Efeknya, daya serap sektor riil terhadap jumlah pengangguran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ditambah lagi, akumulasi modal untuk pertumbuhan ekonomi bukan lebih banyak dibelanjakan untuk belanja publik, tetapi disimpan pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan penambahan jumlah penduduk khususnya angkatan kerja melebihi dari pertumbuhan ekonomi yang ada.

**Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear**

Model B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Std. Error	Beta			
(Constant)	8.590	2.232		3.849	.000
1 PERTUMBUHAN. EKONOMI	1.134	.445	.374	2.548	.015

a. Dependent Variable: KEMISKINAN

Dengan mengacu pada tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara signifikan pada level 0,15 terhadap kemiskinan. Penelitian ini sesuai hipotesis yang diajukan. Dengan mengacu pada tabel 4 tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara signifikan pada level 0,15 terhadap kemiskinan. Penelitian ini sesuai hipotesis yang diajukan. Dari hasil riset menunjukkan bahwa meningkat laju pertumbuhan ekonomi

masih bertambah pula tingkat pengangguran. Dari data yang dimiliki pemerintah daerah kota Surakarta dan sekitarnya menunjukkan peningkatan yang cukup baik, hal ini mungkin disebabkan oleh melonjaknya konsumsi pada kawasan solo raya dan minat investasi yang kuat selama beberapa tahun ini. Tetapi ternyata peningkatan pendapatan tersebut tidak dirasakan oleh para masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan pertumbuhan saat ini terjadi di sector yang tidak menciptakan lapangan

pekerjaan (sektor non-tradable). Sektor industry pengolahan terbelit banyak masalah, seperti infrastruktur, birokrasi perpajakan, dan korupsi. Adapun sector pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan terhambat masalah seputar perizinan dan penyediaan lahan. Hal-hal itulah yang menyebabkan terjadinya penurunan kontribusi.

Selanjutnya terdapat dua indikator validitas model di dalam analisis jalur (*path analysis*) yaitu koefisien determinan total dan *trimming theory*. Untuk koefisien determinan total merupakan total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model yang diukur dengan:

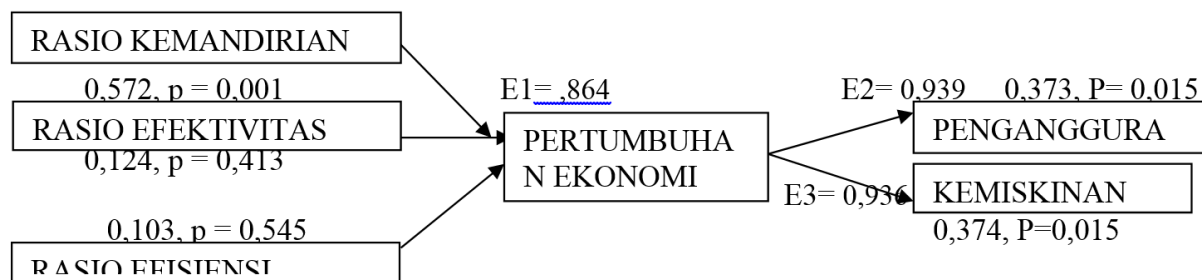
$$R2m = 1 - PE1.^2 PE2.^2 PE3^2$$

$$R2m = 1 - (0,864)^2 (0,939)^2 (0,936)^2$$

$$R2m = 1 - 0,746. 0.882. 0.876$$

$$R2m = 1 - 0,576$$

$$R2m = 0,424 \text{ atau } 42,4\%$$



Berdasarkan model tersebut di atas menunjukkan pengaruh tidak langsung rasio Kemandirian ke pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar  $0,572 \times 0,373 = 0,2133$  atau sebesar 21.33%. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada pengangguran. Pada pengaruh tidak langsung rasio kemandirian ke kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar  $0,572 \times 0,374 = 0.214$  atau 21.4 %. Hasil ini sesuai hipotesis yang diajukan. Ini menunjukkan rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif juga terhadap kemiskinan.

dimana:

- $R2m$  = total keragaman data
- $PE1^2$  = nilai kuadrat residu pada pertumbuhan ekonomi
- $PE2^2$  = nilai kuadrat residu pada pengangguran
- $PE3^2$  = nilai kuadrat residu pada kemiskinan

Besarnya  $R2m$  sebesar 42,4 % artinya keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 42,4 % atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data 42,4% dapat dijelaskan oleh model tersebut, sedangkan sisanya sebesar 57,6 % dijelaskan oleh variabel lain yang belum dimasukkan dalam model penelitian. Berdasarkan teori *trimming*, maka jalur-jalur yang non signifikan dibuang sehingga diperoleh model yang didukung oleh data empirik. Adapun model dalam bentuk diagram jalur berdasarkan teori *trimming* adalah sebagai berikut:

Pada pengaruh tidak langsung rasio efektivitas ke pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar  $0,124 \times 0,373 = 0,046$  atau sebesar 4,6%. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada pengangguran. Pada pengaruh tidak langsung rasio efektivitas ke kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar  $0,124 \times 0,374 = 0,047$  atau 4,7%. Hasil ini sesuai hipotesis yang diajukan. Ini menunjukkan rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Pada pengaruh tidak langsung rasio efisiensi ke pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar  $0,103 \times 0,373 = 0,038$  atau sebesar 3,8%. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada pengangguran. Pada pengaruh tidak langsung rasio efisiensi ke kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar  $0,103 \times 0,374 = 0,039$  atau 3,9%. Hasil ini sesuai hipotesis yang diajukan. Ini menunjukkan rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. (a) Ratio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Eks-

Karesidenan Surakarta. Semakin besar PAD yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah serta semakin kecil pinjaman dan bantuan pusat, maka semakin mandiri daerah tersebut. Dengan semakin mandiri daerah tersebut, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat mengalami peningkatan. (b) Fokus penelitian ini pada kinerja keuangan yang diukur melalui rasio kemandiria, rasio efektifitas dan rasio efisiensi saja.

Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sejenis bisa memasukkan variabel-variabel lainnya, seperti karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), ukuran legislatif, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari, 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Penerbit BPF. Yogyakarta.
- Bruijn, Hans De. 2002. *Performance Measurement in The Public Sector: Strategies to Cope With The Risk of Performance Measurement*. Emerald Insight.
- Budiarto, Bambang. 2007. *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
- Budiarto, Bambang. 2007. *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
- Ghozali, Imam. 2006. *Statistik Multivariat SPSS*. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Greiling, Dorothea. 2005. *Performance measurement in the public sector: the German experience*. Emerald Research, Vol. 54: 551-567.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Hamzah, Ardi, 2008. *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisisjalur (Studi Pada 29 Kabupaten*



*Dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2006*). Jurnal Studi Ekonomi, Vol III No. 1, Juni.

Hariato, David dan Priyo Hari Adi, 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.

Landiyanto, Erlangga Agustino, 2005. *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*. Cures Working Paper, No. 05/01.

Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Nolan, James F, Moore, Adrian, dan Segal, Geoffrey. 2003. *Putting out the trash: measuring municipal service efficiency in U.S. cities*. Working Paper Series. SSRN September

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business : Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.

Todaro, MP. 1997. *Economic Development*. Sixth Edition. Published by New York University.

*UU No.22 Tahun 1999* tentang Pemerintahan Daerah

*UU No.25 Tahun 1999* tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah